**BAB.III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “**kinerja**” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Pada Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

1. **METOTOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. *Tingkat Realisasi Positif.*

Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Target

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.1. | Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor | Capaian | Keterangan |
| 4 | > 100 % | sangat baik |
| 3 | 75 % - 100 % | baik |
| 2 | 55 % - 74 % | cukup |
| 1 | < 55 % | kurang |

1. *Perbandingan persentase peningkatan*

Medote ini untuk melihat persentase peningkatan realisasi setiap tahunnya yang di hitung dengan cara membandingkan realisasi sekarang lalu dengan realisasi tahun lalu dengan rumus sebagai berikut :

% Peningkatan = ( Realisasi Tahun Sekarang – Realisasi Tahun lalu) x 100

Realisasi Tahun lalu

1. **HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan 5 (lima) sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.2. | Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | - | Nilai evaluasi akuntabilitas | BB% | BB% | Sangat baik |
| 2 | Meningkatnya serapan tenaga kerja | - | Persentase serapan tenaga kerja | 55,40% | 62,30% | 112,45 |
| 3 | Meningkatnya hubungan industri yang harmonis | - | Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan | 49,27% | 60,52% | 112,95 |
| 4 | Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi | - | Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun | 1 kawasan | 1 kawasan | 100 |
| 5 | Meningkatnya kemandirian transmigran | - | Indeks kemandirian kawasan transmigrasi | 50< IPK trans <75 | 68< IPK trans <75 | 90,66 |

1. **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pada bagian ini akan menjelaskan secara rinci capaian kinerja SKPD yang meliputi capaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Strategis telah menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran

pencapaian sasaran strategis SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Tujuan I** | Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |

1. Keberhasilan Tujuan 1 (satu) yaitu Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK dapat diukur melalui keberhasilan atau capaian dari indkator kinerja tujuan I (satu) yaitu Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target sebesar 67,50% pada tahun 2021 telah terealisasi pada tahun 2019 sebesar 67,51% dengan capaian sebesar 100,01%

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.3. | Capaian Indikator Tujuan I |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Tujuan | Target tahun 2021 | Realisasi tahun 2019 | Capaian (%) |
|
| 1 | Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 67,50% | 67,51% | 100,01 |

Dari tabel 3.3. di atas, diharapkan target indikator tujuan pada akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 67,50% sudah melebihi tercapai.

Pencapaian indikator tujuan I ini juga dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.4. | Realisasi Indikator Tujuan I |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Realisasi tahun 2018 | Realisasi tahun 2019 | Peningkatan (%) |
|
| 1 | Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 67,26% | 67,51% | 0,25% |

Dari tabel 3.4. di atas, dapat lihat bahwa realisasi Tingkat Partisipasi Angatan Kerja (TPAK) pada tahun 2019 sebesar 67,51%, sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 67,26% realisasi ini mangalami peningkatan sebesar dari tahun 2018 sebesar 0,25%

Untuk mencapai tujuan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur capaian dari suatu target kinerja, yaitu Sasaran (1) meningkatnya serapan tenaga kerja (2) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dengan indikator kinerja persentase serapan tenaga kerja dan jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan dan evaluasi terhadap kedua sasaran di atas akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Sasaran I :** | Meningkatnya serapan tenaga Kerja |

Capaian Sasaran I Meningkatkan serapan tenaga kerja dengan Indikator Persentase serapan tenaga kerja pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3. 5 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.5. | Capaian Indikator Sasaran I |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | |
| Target  Tahun 2019 | Realisasi  Tahun 2019 | Capaian % |
| 1 | Meningkatnya serapan tenaga Kerja | - | Persentase serapan tenaga kerja | 55,40% | 62,30% | 112,45 |

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran I Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan Indikator kinerja persentase Peningkatan serapan Tenaga Kerja sudah terealisasi melebihi target 55,40% dengan realisasi sebesar 62,30% (capaian 112,45% dengan kategori “Sangat Baik”).

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran I meningkatnya serapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan serapan tenaga kerja. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah :

* Meningkatkan Tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan Kerja.

Target tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan kerja sebesar 35,01 %, tercapai sebesar 36,67%. Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi 14.000 orang, sedangkan yang lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 14.668 orang.

Gbr. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan

* Meningkatkan tenaga kerja yang kempeten melalui pemagangan .

Target tenaga kerja yang berkompeten melalui pemagangan sebesar 1,25%, tercapai sebesar 2,07% dengan Capaian sebesar 0,52 % . Jumlah Calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan sebesar 500 orang. Bidang Pelatihan dan Penempatan mempunyai tugas untuk mendorong perusahaan agar melakukan pemagangan secara mandiri sehingga diharapkan kedepannya perusahaanlah yang akan memegang peran aktif dalam program magang kerja. Jumlah tenaga kerja lulusan magang dalam negeri secara mandiri pada tahun 2019 adalah sebesar 532 orang, sedangkan tenaga kerja lulusan magang ke luar negeri (magang ke Jepang) sebanyak 296 orang.

* Meningkatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi

Target peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah dan Swasta yang terakreditas sebesar 66,67 %, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebelumnya yang belum terakreditasi sebanyak 45 LPK sedangkan sampai tahun 2019 sudah terakreditasi sebanyak 30 LPK.

* + 1. **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.6. | Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | | Kategori |
| Target  Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2019 | % Capaian |
| 1 | Meningkatnya serapan tenaga | - | Persentase serapan tenaga kerja | 55,40% | 62,30% | 112,45 | Sangat Baik |

Dari Tabel 3.6 di atas diharapkan target indikator sasaran pada akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 55,40% sudah melebihi target, Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja pada tahun 2019 dari target 55,40% dapat direalisasikan sebesar 62,30% dengan tingkat capaian sebesar 112,45% , capaian ini dikategorikan sangat baik (> 100%). Keberhasilan dari capaian target Sasaran I ini diperoleh melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan calon pencari kerja seperti pelatihan yang dilaksanakan di BLK, pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, pembinaan dan penyuluhan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat, pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) berupa kegiatan padat karya baik yang didanai oleh APBD maupun APBN.

* + 1. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.**

Capaian Indikator Sasaran I jika dibandingkan perkembangan nya dari capaian tahun 2016 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.7 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.7. | Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2017 sd 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | | | | | | | |
| 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatnya serapan tenaga kerja | - | Persentase serapan tenaga kerja | 30.53% | 27.58% | 90.34% | 23.66% | 27.87% | 117.79% | 55,40% | 60,32% | 112,45% |

Dari Tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan penaikan Target Indikator dari tahun 2017 sd tahun 2019, hal ini disebabkan terjadinya rasionalisasi anggaran, dimana pada tahun 2017 s/d 2018 anggaran untuk mendukung kegiatan ini sesuai dengan target, sedangkan pada perhitungan target 2019 terjadi rasionalisasi anggaran.

* + 1. **Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.**

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 berdasarkan target Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.8. | Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Realisasi | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian sd 2019 terhadap Renstra 2021 |
|
| 1 | Meningkatnya serapan tenaga kerja | Persentase Serapan Tenaga Kerja | 60,32% | 50.8% | 54.82 |

Dari tabel 3.8. di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Serapan Tenaga Kerja sebesar 8.126 orang (27.87%) dengan capaian sampai dengan akhir Renstra tahun 2021 sebesar 54.82%. dan diharapkan akan mencapai target 100% pada Tahun 2021. Realisasi ini merupakan capaian serapan tenaga kerja dari sektor Formal sebanyak 6.382 orang (21.89%) dan sektor informal sebanyak 1.744 orang (5,98%).

* + 1. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.9. | Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi 2019 | Realisasi Nasional | Capaian (%) |
|
| 1 | Meningkatnya serapan tenaga kerja | Persentase Serapan Tenaga Kerja | 60,32% | 26.47% | 105.29 |

Dari tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Capaian Kinerj Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ikut memberikan kontribusi positif terhadap capaian target nasional, bahkan melebihi dari target Nasional ( sebesar 105,29%).

* + 1. **Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase Serapan Tenaga Kerja dari target 55,40% terealisasi sebesar 60,32% dengan capaian 112,45% pada tahun 2019, dimana dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 39.998 orang maka sudah sebanyak 9.425 (23,56%) orang yang diterima/ditempatkan bekerja baik secara formal maupun non formal. hal didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan pelatihan, pemagangan baik dalam dan luar negeri, peningkatan produktivitas, peningkatan pelayanan informasi bagi para calon pencari kerja dan peningkatan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja, serta meningkatkan UMKM dan kelompok masyarakat. Disamping itu juga dilakukan Sosialisasi dan pendampingan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di 19 Kabupaten / Kota, baik melalui dana APBD maupun APBN. Upaya – upaya ini mendukung peningkatan serapan tenaga kerja baik formal maupun non formal.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.10. | Serapan Tenaga Kerja Sektor Formal Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Target (orang** | **Realisasi (orang)** | **Capaian (%)** |
| 1 | Antar Kerja Lokal (AKL) | 4.800 | 4.358 | 90,79 |
| 2 | Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | 200 | 897 | 448,50 |
| 3 | Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | 1,300 | 1.286 | 98,92 |
|  | **Jumlah** | **6.300** | **6.541** | **103,82** |

*Sumber data : Bidang Latpen*

Tabel 3.10 di atas menjelaskan bahwa serapan tenaga kerja yang terdiri dari Antar Kerja Lokal (AKL) yaitu serapan tenaga kerja yang terdapat di dalam sumatera Barat yaitu jumlah pencari kerja yang terdaftar yang diterima bekerja di perusahaan lingkup Sumatera Barat sebanyak 6.541 orang. Jumlah pencari kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 897 orang yaitu jumlah pencari kerja yang diterima bekerja diluar provinsi Sumatera Barat seperti Jakarta, Jawa, Pekanbaru dan Batam, dalam hal ini masih didominasi oleh Daerah dengan jenis usaha pada bidang elektonika dan indutri. Jumlah pencari kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 1.286 orang yaitu jumlah pencari kerja terdaftar yang diterima bekerja di Negara lain, dalam hal ini masih didominasi oleh Negara Jepang dengan bidang usaha Pertanian dan industry.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.11. | Serapan Tenaga Kerja Sektor In Formal Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Target (orang** | **Realisasi (orang)** | **Capaian (%)** |
| 1 | Padat Karya | 958 | 1.892 | 197,49 |
| 2 | Teknologi Tepat Guna (TTG) | 100 | 128 | 128 |
| 3 | Tenaga Kerja Mandiri (TKM) | 300 | 864 | 288 |
|  | **Jumlah** | **1.358** | **2.884** | **613,49** |

*Sumber data : Bidang Latpen*

Dari Tabel 3.11 di atas terlihat bahwa serapan tenaga kerja melalui sektor In formal capaiannya melebihi target, hal ini dilakukan melalui kegiatan – kegiatan baik melalui APBD maupun APBN Tahun 2019 antara lain kegiatan Padat karya, peningkatan pemanfaatan Teknologi tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja mandiri (TKM) yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja melebihi target.

Disamping itu juga upaya peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sangat berpengaruh dalam menciptakan tenaga- tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga mendapat meningkatkan serapan tenaga kerja. Di Sumatera Barat hingga tahun 2019, dari 320 LPK yang ada sudah sebanyak 220 LPK yang terakreditasi dan 100 LPK yang akan di Akreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Peningkatan serapan tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja juga dilaksanakan baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14.500 orang yang dilakukan pelatihan baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota melalui anggaran APBD dan APBN. Pelatihan dilaksanakan di 12 Kabupaten /Kota Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilakukan baik APBD maupun APBN di Provinsi maupun Kabupaten / Kota hal ini berpengaruh terhadap peningkatkan serapan tenaga kerja dan mengurangi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2019 angka TPT Provinsi Sumatera Barat sebesar 5.33% mengalami penurunan sebesar 0.22% dari tahun 2018 ( TPT sebesar 5.55%). Data ini merupakan akumulasi dari seluruh capaian Kabupaten/Kota SeSumatera Barat sebagaimana tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.12. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KABUPATEN/KOTA** | **TPT (%)** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | KAB. KEP. MENTAWAI | 1.96 | 2.27 | 2.92 |
| 2 | KAB.PESISIR SELATAN | 5.95 | 5.85 | 5.84 |
| 3 | KAB.SOLOK | 6.05 | 5.92 | 4.65 |
| 4 | KAB.SIJUNJUNG | 3.32 | 3.2 | 3.68 |
| 5 | KAB.TANAH DATAR | 3.72 | 3.86 | 3.14 |
| 6 | KAB.PADANG PARIAMAN | 6.65 | 6.9 | 5.97 |
| 7 | KAB.AGAM | 4.23 | 4.82 | 4.72 |
| 8 | KAB.LIMA PULUH KOTA | 2.6 | 2.7 | 2.28 |
| 9 | KAB.PASAMAN | 6.81 | 5.88 | 5.21 |
| 10 | KAB.SOLOK SELATAN | 5.54 | 5.85 | 4.91 |
| 11 | KAB.DHARMASRAYA | 3.69 | 3.94 | 5.08 |
| 12 | KAB.PASAMAN BARAT | 3.99 | 3.37 | 4.64 |
| 13 | KOTA PADANG | 9.44 | 9.18 | 8.76 |
| 14 | KOTA SOLOK | 5.88 | 5.97 | 7.09 |
| 15 | KOTA SAWAHLUNTO | 6.19 | 5.75 | 6.82 |
| 16 | KOTA PADANG PANJANG | 5.43 | 5.28 | 4.35 |
| 17 | KOTA BUKITTINGGI | 6.94 | 7.15 | 6.14 |
| 18 | KOTA PAYAKUMBUH | 3.45 | 3.78 | 4.11 |
| 19 | KOTA PARIAMAN | 5.97 | 5.72 | 5.42 |
| SUMATERA BARAT | | 5.58 | 5.55 | 5.33 |

Sumber data : BPS Sumatera Barat

* + 1. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan serapan tenaga kerja dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengantar kerja , instruktur pengajar serta fungsional Penggerak Swadaya masyarakat yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggran yang cukup memadai baik melalui anggaran APBN maupun APBD. Pada Tahun 2019, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.360.171.800,- dengan jumlah kegiatan 27 Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.12 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.12. | Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Belanja/ Nama Indikator yang menunjang |  |  | DANA (Rp.) |  | |
| KEUANGAN | |
| (Rp.) | % |
|  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | **6,757,486,800.00** | **6,497,045,903.00** | **96.15** |
| Sosialisasi dan Seleksi Daerah Calon Peserta Magang ke Jepang | | | 75,587,500.00 | 70,428,549.00 | 93.17 |
| Pelatihan Wirausaha Baru Produktiv | | | 192,894,000.00 | 185,615,000.00 | 96.23 |
| Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD BLK Payakumbuh | | | 2,434,359,000.00 | 2,354,597,170.00 | 96.72 |
| Akredetasi Lembaga Pelatihan Kerja | | | 103,000,000.00 | 90,611,467.00 | 87.97 |
| Seleksi Pusat Calon Peserta Magang ke Jepang | | | 233,660,000.00 | 211,931,714.00 | 90.70 |
| Pembentukan dan Pembinaan Klinik Produktivitas | | | 147,571,000.00 | 100,997,864.00 | 68.44 |
| Monitoring program pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota | | | 49,581,000.00 | 49,563,226.00 | 99.96 |
| Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri | | | 201,320,000.00 | 195,783,200.00 | 97.25 |
| Pengukuran Produktivitas Makro | | | 77,628,000.00 | 72,080,200.00 | 92.85 |
| Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi Pelatihan | | | 188,750,000.00 | 188,281,700.00 | 99.75 |
| Bimtek dan Upgrading Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas dan Pembinaan Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas | | | 138,906,000.00 | 137,547,200.00 | 99.02 |
| Workshop Pemagangan | | | 226,060,000.00 | 213,416,100.00 | 94.41 |
| Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi usaha Produktif | | | 244,768,000.00 | 224,916,000.00 | 91.89 |
| Pelatihan Pra Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang | | | 404,019,000.00 | 377,038,850.00 | 93.32 |
| Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM) | | | 199,383,300.00 | 199,383,000.00 | 100.00 |
| Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD BLK Padang Panjang | | | 1,840,000,000.00 | 1,824,854,663.00 | 99.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN YANG MENDUKUNG | DANA (Rp.) | KEUANGAN | |
|
| (Rp.) | % |
| **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DIVERIFIKASI USAHA** | | | **1,805,085,200.00** | **1,767,069,250.00** | **97.89** |
| Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) | | | 69,864,600.00 | 64,694,850.00 | 92.60 |
| Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | | | 416,940,000.00 | 410,480,150.00 | 98.45 |
| Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) | | | 131,217,000.00 | 130,589,600.00 | 99.52 |
| Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) | | | 245,263,000.00 | 239,307,900.00 | 97.57 |
| Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri | | | 136,894,000.00 | 136,734,000.00 | 99.88 |
| Pengumpulan dan Pengelolahan Data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian | | | 54,007,800.00 | 48,438,049.00 | 89.69 |
| Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja | | | 160,000,000.00 | 159,723,450.00 | 99.83 |
| Monitoring dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | | | 100,000,000.00 | 97,284,301.00 | 97.28 |
| Pembinaan Bursa Kerja Online | | | 132,921,100.00 | 132,576,400.00 | 99.74 |
| Bimtek Petugas Pengumpulan Dan Pengolahan Informasi Pasar Kerja | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |
| Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) | | | 150,010,000.00 | 142,546,500.00 | 95.02 |
| Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra- Pemberangkatan | | | 65,931,100.00 | 65,421,000.00 | 99.23 |
| Pengumpulan dan pengolahan data Informasi Pasar Kerja (IPK) | | | 23,006,600.00 | 20,894,350.00 | 90.82 |
| Forum Group Diskusi Teknis Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) | | | 69,030,000.00 | 68,378,700.00 | 99.06 |

Sesuai dengan tabel 3.12 di atas program yang mendukung sasaran 1 (satu) Persentase peningkatan serapan tenaga kerja terdiri atas 2 (dua) program yaitu : (1). Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.757.486.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 6.497.045.903 ( 96,15%) dengan realisasi 100% . (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi usaha dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.805.085.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.767.069.250 (97,89%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Dampak dari pencapaian sasaran persentase peningkatan serapan tenaga kerja ini adalah meningkatanya jumlah pencari kerja yang berkompeten sehingga dapat berdaya saing di pasar kerja hal ini akan berpengaruh tentunya terhadap peningkatan kesemmpatan kerja.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.13. | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **%Capain Kinerja** | **Persentase Penyerapan Anggaram** | **% Tingkat Efisiensi** |
|
| Peningkatan kesempatan kerja | Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja | 112,45% | 95.77% | 122.99 |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang mendukung sasaran I (satu) yaitu Peningkatan kesempatan kerja dengan indikator persentase peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 112,45% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,77% telah mengefisiensikan penggunaan sumberdaya sebesar 122,99%. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan ini cukup efektif dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja dan dapat dilaksanakan seefisien mungkin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.2.** | **Sasaran II :** | Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis |

Capaian Sasaran II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator Jumlah Penurunan kasus ketenagakerjaan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3. 14 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.14. | Capaian Indikator Sasaran II |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis. | - | Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan | 49,27% | 60,52% | 112,95% |

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan sudah terealisasi melebihi target 49,27% dengan realisasi sebesar 60,52% (capaian 112,95% dengan kategori “Sangat Baik”).

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran II Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan serapan tenaga kerja. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah :

* Meningkatkan hubungan industrial di perusahaan melalui :
* Pengesahan Perjanjian Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan.
* Pebentukan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit dan Tripartit di perusahaan dan menurunkan tingkat perselisihan hubungan industrial
* Menurunkan perselisihan hubungan industrial di perusahaan
* Meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang kondusif
* penerapan Sistem manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
* Meningkatkan kepatuhan Wajib Lapor Keetenagakerjaan
* Menurunkan kasus kecelakaan kerja
* Pengupahan dan kesejahteraan Pekerja, melalui Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP)
* Meningkatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Peningkatan Perusahaan untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan
  + 1. **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja , Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Meningkatnya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.15. | Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | | Kategori |
| TARGET  Tahun 2019 | REALISASI  Tahun 2019 | CAPAIAN (%) |
| 2 | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis. | - | Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan | 49,27% | 60,52% | 112,95% | Sangat baik |

Dari Tabel 3.12 di atas Capaian Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang taat Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2019 dari target 49,27% dapat direalisasikan sebesar 60,52% dengan tingkat capaian sebesar 112,95% , capaian ini dikategorikan sangat baik (> 100%). Jumlah Perusahaan di Sumatera Barat sebanyak 8.300 perusahaan (data dari Bidang HI-Was) baik menengah dan besar. Dari target 1.200 (14,46%) perusahaan yang taat Peraturan Perundang-Undangan dapat direalisasikan sebanyak 1.200 (14,46% ) perusahaan hal ini tak lain dari upaya peningkatan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan – perusahaan dalam mentaati peruaturan perundang- udangan ketenagakerjaan.

* + 1. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.**

Capaian Indikator Sasaran II jika dibandingkan perkembangan nya dari capaian tahun 2017 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.16 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.16. | Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2017 sd 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | | | | | | | |
| 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis. | - | Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan | 48,92% | 48,57 | 99,28% | 6,20% | 9,34% | 150,6% | 49,27% | 60,52% | 112,95% |

Dari Tabel 3.16 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dan penaikan Target Indikator dari tahun 2017 sd tahun 2019 hal ini disebabkan terjadinya perubahan sistem penghitungan, dimana pada tahun 2017 s/d 2018 terjadi kesalahan dalam sistem penghitungan, sehingga dilakukan Revisi Target pada Renstra, namun jika dilihat dari capaian terjadi penurunan capaian dikrenakan data diambilkan dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK Online).

* + 1. **Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.**

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 berdasarkan target Renstra 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.17. | Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2019 | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian sd 2019 terhadap Renstra 2021 |
|
| 1 | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis. | Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan | 60,52% | 6,20 | 112,95% |

Dari tabel 3.13. di atas dapat dilihat bahwa Realisasi meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dengan indikator jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan sebesar 60,52% dengan capaian sampai dengan akhir Renstra tahun 2021 sebesar 112,95%.

* + 1. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.18. | Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi 2019 | Realisasi Nasional | Capaian (%) |
|
| 1 | Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis. | Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan | 60,52% | 16,22% | 112,95% |

Dari tabel 3.14 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat masih dibawah standar nasional (57,58%)

* + 1. **Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang taat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan capaian 112,95%, didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan ke setiap perusahaan yang ada di Bumatera Barat, Sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan dan pembentukan lembaga-lembaga yang diharus dalam suatu perusahaan sesuai Undang- undang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2016 baik melalui dana APBD maupun APBN.

Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan dalam menegakan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pekerja. Pengawasan yang dilakukan oleh Tenaga fungsional Pengawas yang dimiliki oleh Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sehingga kasus – kasus perselisihan yang terjadi dapat dikurangi atau diminimalisir, hal ini terbukti berkurangnya 0,64% kasus yang ditangani dari tahun sebelumnya. Disamping itu telah meningkatnya jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Tripartit dan Bipartit yaitu sebanyak 51,23% dari jumlah perusahaan yang ada. Peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan disuatu perusahaan juga meningkat sebanyak 12,54% dari tahun sebelumnya. Kepatuhan perusahaan dalam melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga meningkat sebanyak 1.200 perusahaan dari 8.300 perusahaan yang ada (4,46%). Begitu pula terhadap perusahaan yang telah melaksanakan SMK3 sebanyak 60 perusahaan dari 263 perusahaan yang wajib melaksanakan SMK3 (22,81%). Kemudian sebanyak 625 perusahaan yang sudah disahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB dari 4.012 perusahaan sesuai data WLK (Wajib Lapor Ketenagakerjaan). Pada tahun 2019, Sumatera Barat mendapat Penghargaan dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Indutrial dan Pengawasan dari kementerian Ketenagakerjaan.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.19. | Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2018 |



Sumber data : BPJS Ketenagakerjaan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjan mengalami peningkatan sebanyak 22,77% dengan pertumbuhan sebesar 68,47%.

Capaian - capaian di atas merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran II di atas.

* + 1. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang taat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengawas ketenagakerjaan , mediator, litkayasa K-3 yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggran yang cukup memadai baik melalui anggaran APBN maupun APBD. Pada Tahun 2018, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dan Program perlindungan tenaga kerja dan system pengawasan tenaga kerja dan program pengadaan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 2.142.262.607,- dengan jumlah kegiatan 19 Kegiatan yang mendukung pencapaian indicator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.19. | Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikitor Kinerja Sasaran II |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN | DANA (Rp.) | |  | | |
| KEUANGAN | | |
| (Rp.) | % | |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN** | | | **688,056,300.00** | | **629,721,294.00** | | **91.52** |
| Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan | | | 62,047,800.00 | | 46,184,878.00 | | 74.43 |
| Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten/Kota | | | 42,976,000.00 | | 36,764,300.00 | | 85.55 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat perusahaan | | | 81,772,000.00 | | 75,456,000.00 | | 92.28 |
| Pembinaan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/kota dan penetapan UMP | | | 83,040,000.00 | | 81,120,150.00 | | 97.69 |
| Pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit di Kab/Kota dan Provinsi | | | 66,307,000.00 | | 57,110,116.00 | | 86.13 |
| Bimte Struktur Skala Upah | | | 98,602,000.00 | | 95,601,800.00 | | 96.96 |
| Bimtek Tata Cara Pembuatan PP/PKB | | | 150,000,000.00 | | 146,995,200.00 | | 98.00 |
| Pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit di Perusahaan | | | 41,491,500.00 | | 33,503,600.00 | | 80.75 |
| Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan di Kab/Kota | | | 61,820,000.00 | | 56,985,250.00 | | 92.18 |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM   PENGAWASAN TENAGA KERJA** | | | | **948,585,350.00** | **889,443,669.00** | | | **93.77** |
| Pengujian lingkungan kerja | | | | 44,300,000.00 | 43,789,600.00 | | | 98.85 |
| Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan | | | | 172,220,000.00 | 163,080,815.00 | | | 94.69 |
| Pemeriksaan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab/Kota | | | | 192,240,000.00 | 170,213,092.00 | | | 88.54 |
| Penanganan kasus ketenagakerjaan | | | | 106,859,950.00 | 90,236,348.00 | | | 84.44 |
| Pembinaan Penerapan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan | | | | 178,881,000.00 | 175,686,814.00 | | | 98.21 |
| Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) | | | | 75,151,000.00 | 74,729,300.00 | | | 99.44 |
| Akreditasi laboratorium | | | | 51,000,000.00 | 47,309,900.00 | | | 92.76 |
| Pemeriksaan Kesehatan Kerja | | | | 57,850,000.00 | 57,640,000.00 | | | 99.64 |
| Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) Di Perusahan | | | | 70,083,400.00 | 66,757,800.00 | | | 95.25 |
|  | | | |  |  | | |  |
| **PROGRAM PENGADAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM** | | | | **111,200,000.00** | **83,961,954.00** | | | **75.51** |
| Pemeliharaan Alat Labor | | | | 40,000,000.00 | 39,361,354.00 | | | 98.40 |
| Pengadaan Alat Labor | | | | 71,200,000.00 | 44,600,600.00 | | | 62.64 |
| Jumlah | | | |  |  | | |  |

Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran II (dua) Persentase perusahaan yang taat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terdiri atas 3 (tiga) program yaitu : (1). Program pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana labratorium dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 111.200.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 83.961.954 ( 75,51%) dengan realisasi 100% . (2) Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagkerjaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 688.056.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 629.721.294,- (91,52%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program Perlindungan tenaga kerja dan system pengawasan tenaga kerja dengan jumlah anggaran Rp. 948.585.350,- denga realisasi keuangan sebesar Rp. 889.443.669,- (93,77) dengan realisasi fisik 100%.

Dampak dari pencapaian sasaran persentase Persentase perusahaan yang taat peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berpengaruh terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan perngusaha sehingga kesejahteraan pekerja dapat terjamin, dengan harapan kondisi ini akan meningkatkan saerapan tenaga kerja yang akan berdampak juga terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.20. | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **%Capain Kinerja** | **Persentase Penyerapan Anggaram** | **% Tingkat Efisiensi** |
|
| Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan | Persentase perusahaan yang taat peraturan oerundang-undangan ketenagakerjaan | 112,95% | 91,72% | 123,15 % |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang mendudukung sasaran II (dua) yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebesar 150,60% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,85% telah mengefisiensikan penggunaan sumberdaya sebesar 162,61%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Tujuan II** | Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran |

Keberhasilan Tujuan II (Dua) yaitu meningkatnya kesejahteraan transmigran dapat diukur melalui pencapaian indikator tujuan yaitu tingkat kesejahteraan transmigran dimana dari target 75% yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 68% (dengan capaian 90,66%). Hal ini dapat dilihat dengan tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.21. | Capaian Indikator Tujuan II |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Realisasi  Tahun 2019 | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian sd 2019 terhadap Renstra 2021 |
|
| 2 | Meningkatnya kesejahteraan transmigran | Tingkat Kesejahteraan Transmigrasi | 68% | 75% | 90,66 |

Dari Tabel di atas, diharapkan target 75% sampai akhir tahun 2021 akan dapat di capai. Pencapaian Tujuan II ini juga didukung dari realisasi Sasaran dan indikator sasaran yang telag ditetapkan guna pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Sasaran akan dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Sasaran III :** | Meningkatnya kemandirian transmigran |

Capaian Sasaran III Meningkatnya kemandirian transmigran dengan Indikator indeks kemandirian kawasan transmigrasi pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3. 22 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.22. | Capaian Indikator Sasaran III |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | |
| TARGET 2019 | REALISASI  2019 | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatnya kemandirian transmigran | - | Indeks kemandirian transmigran | 70% | 68% | 97,14% |

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran III Meningkatnya kemandirian Transmigran dengan Indikator indeks kemandirian transmigran belum terealisasi sesuai target 70% dengan realisasi sebesar 68% dengan vapaian 97,14% kategori (Sangat Baik).

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran III Meningkatnya kemandirian Transmigran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan pendapatan warga di kawsan transmigrasi. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah :

* Melakukan pembinaan sosial budaya dan ekonomi bersama lintas sector terkait di lokasi transmigrasi
* Menfasilitasi jaminan hidup warga transmigrasi selama 5 (lima) tahun berturut-turut hingga masyarakat transmigran sudah dikatakan mandiri
* Memberikan pelatihan kepada warga transmigrasi dalam upaya peningkatan keterampilan rumah tangga
* Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi guna mempermudah akses perekonomian dan lainnya.
* Menfasilitasi kesehatan, agama dan pendidikan terhadap warga transmigrasi.

Gbr. Melakukan Pembinaan dan fasilitasi sarana kebutuhan bagi

warga transmigran

* + 1. **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja, target dan realisasi kinerja Sasaran III Meningkatnya kemandirian Transmigran dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.23. | Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran III Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | | Kategori |
| TARGET  2018 | REALISASI  2019 | CAPAIAN (%) |
| 3 | Meningkatnya kemandirian Transmigran | - | Indeks kemandirian transmigran | 40% | 70% | 175% | Sangat Baik |

Dari Tabel 3.23 di atas Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya kemandirian Transmigran pada tahun 2018 dari realisasi 40% mengalami peningkatan sebesar 30% pada tahun 2019 sebesar 70% dengan sangat baik ( 175%). Untuk Bidang Transmigrasi, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah penerima, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN sudah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk peningkatan pendapatan warga di kawsan transmigras.

* + 1. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.**

Capaian Indikator Sasaran III jika dibandingkan perkembangan nya dari capaian tahun 2017 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.24 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.24. | Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2017 sd 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | |
| Target | | Realisasi | | Capaian (%) | | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | |
| 1 | Meningkatnya kemandirian Transmigran trasmigrasi |  | Indeks kemandirian transmigran | | 40% | | 40% | | 100% | | 50% | | 60% | | 120% | | 70% | | 68% | | 97,14% | |

Dari Tabel 3.24 di atas, dapat dilihat bahwa target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dengan capaian 97,40% setiap tahunnya.

* + 1. **Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.**

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran III Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan target Renstra 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.25. | Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Realisasi | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian sd 2019 terhadap Renstra 2021 |
|
| 1 | Meningkatnya kemandirian Transmigran trasmigrasi | Indeks kemandirian transmigran | 68% | 75% | 90,66% |

Dari tabel 3.25. di atas dapat dilihat bahwa Realisasi persentase Meningkatnya kemandirian Transmigran trasmigrasi dengan target indikator Indeks kemandirian transmigran dapat direaalisasikan sebesar 68% dari target 75% pada akhir RPJMD tahun 2021. Capaian ini diperoleh tak lain dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diupayakan baik dari APBD maupun APBN, antara lain melalui pembinaan warga transmigran, fasilitasi sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, membuka akses ke pusat kota dan sarana lainnya.

* + 1. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional**

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.26. | Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi 2019 | Realisasi Nasional | Capaian (%) |
|
| 1 | Meningkatnya kemandirian Transmigran trasmigrasi | Indeks kemandirian transmigran | 68% | 75% | 90,66% |

Dari tabel 3.18 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat direalisasikan masih dibawah target yang telah ditetapkan oleh Kementarian Desa Pembangunan dan Daerah tertinggal dan transmigrasi.

* + 1. **Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Indeks kemandirian transmigran dengan capaian 90,66%, didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan pembinaan, monitoring dengan lintas sektor terkait, fasilitasi pemberian jaminan hidup selama 5 tahun dari kementerian, dan peningkatan serta pengembangan sarpras baik melalui dana APBD maupun APBN. Pada Tahun 2019 Sumatera Barat telah melakukan penempatan terhadap 191 warga transmigran yang berasal dari provinsi Jawa Tengah dan Yogjakarta.

Pada Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penempatan sebanyak 30 KK ( 121 jiwa ) warga Transmigran di Padang Tarok SP.1 Kab. Sijunjung. Untuk Pembinaan tahun ketiga berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+3) untuk lahan usaha I, fasilitas layanan sosial budaya dan Penguatan kelembagaan di Satuan Pemukiman dan melaksanakan pembinaan susaha ekonomi dan sosial budaya secara terpadu dengan 10 SKPD di Kabupaten Sijunjung.

* + 1. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kemandirian Transmigran dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga penggerak Swadaya masyarakat, SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggran yang cukup memadai baik melalui anggaran APBN maupun APBD. Pada Tahun 2019, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastrutur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan anggaran sebesar Rp. 648.386.378,- dengan jumlah kegiatan 4 (empat) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.27. | Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN | DANA (Rp.) |  | |
| KEUANGAN | |
| (Rp.) | % |
| **PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL** | | | **648,386,378.00** | **643,195,964.00** | **99.20** |
| Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi | | | 175,470,000.00 | 174,640,225.00 | 99.53 |
| Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi | | | 60,030,000.00 | 59,281,600.00 | 98.75 |
| Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi | | | 322,165,678.00 | 320,909,715.00 | 99.61 |
| Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi | | | 90,720,700.00 | 88,364,424.00 | 97.40 |

Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran III (tiga) Meningkatnya kemandirian Transmigran trasmigrasi terdiri atas 1 (satu) program yaitu : Program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 648.386.378,- realisasi keuangan sebesar Rp. 643.195.964,- (98,20%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Dampak dari pencapaian Indikator Persentase Peningkatan pendapatan masyarakat pada kawasan transmigrasi berpengaruh meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dikawasan transmigrasi dan pengembangan masyarakat trasnmigrasi. Melalui Anggaran APBN selama 5 (lima) tahun Pemerintah masih mengalokasi anggaran untuk menjamin kehidupan warga transmigran berupa pemberian Jadup (jaminan Hidup) berupa beras dan bahan pokok lainnya serta pembangunan sarana dan prasarana fasilitas dikawasan transmigrasi, hal ini dilakukan hingga warga transmigran benar – benar sudah mandiri dan mampu menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.28. | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **%Capain Kinerja** | **Persentase Penyerapan Anggaram** | **% Tingkat Efisiensi** |
|
| Meningkatnya kemandirian Transmigran trasmigrasi | Indeks kemandirian transmigran | 90,66% | 99,20% | 109,42% |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang mendudukung sasaran III (tiga) yaitu meningkatnya pendapata masyarakat di kawasan transmigrasi sebesar 100%% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,20% telah mengefisiensikan penggunaan sumberdaya sebesar 109,42%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Tujuan III** | Meningkatnya kinerja organisasi |

Keberhasilan Tujuan III ini dapat diukur melalui capaian indikator kinerja organisasi dengan sasaran strategis Meningkatnya kinerja Organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.29. | Capaian Indikator Tujuan III Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Realisasi | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian sd 2019 terhadap Renstra 2021 |
| 3 | Meningkatnya tatakelola organisasi | Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB (73,00%) | A (80%) | 91,25% |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Indikator Tujuan peningkatan tata Kelola Organisasi sebesar 73,00 (BB) hal ini disebabkan adanya perbaikan secara berkelanjutan baik terkait penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja dan perbaikan dalam penyusunan laporan, disamping itu juga monitoring secara instern dalam pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran juga mendukung pencapaian peningkatan realisasi target kinerja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Sasaran IV** | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi |

Untuk mencapai Tujuan III, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.30. | Target Indikator Kinerja sasaran IV |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB |

Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan serangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat ukur dan prosedur yang telah dirancang dan disusun untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengkllasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi yang telah berorientasi pada outcome dan upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (AKIP) mengacu pada Indikator pengukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 35%
2. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15%
4. Evaluasi Kinerja dengan bobot 10%
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%

Pada tahun 2017, nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai BB (73,00%) dari target BB (74,00%). Perolehan ini tidak lain adalah dari capaian seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun, baik itu capaian program dan kegiatan, capaian kinerja, dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diharapkan capaian nilai Laporan Kinerja pada tahun 2018 ini akan lebih baik.

Indikator Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik pengelolaan Program/ keuangan tepat waktu sesuai denga anggaran kas dengan target > 95%.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.31. | Capaian Indikator Sasaran IV |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | - | Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB | BB | Sangat baik |

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran IV Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas KInerja dari target BB terealisasi BB dengan capaian sangat baik, Sedangkan Indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas sudah terealisasi sesuai target 95% dengan realisasi sebesar 95,28% (capaian 100% dengan kategori “Sangat Baik”).

* + 1. **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja , Target dan Realisasi Kinerja Sasaran IV Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.32. | Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | | Kategori |
| TARGET  2019 | REALISASI  2019 | CAPAIAN (%) |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | - | Nilai Evaluasi Akuntabiloitas Kinerja | BB | BB | Sangat baik | Sangat baik |

Dari Tabel 3.16 di atas Capaian Indikator Kinerja Persentase nilai evaluasi Akuntabilitas dari target BB terealisasi BB dengan capaian 98,64% (kategori “Baik”), sedangkan untuk capaian indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas dari target 95% dapat direalisasikan 95,28% dengan capaian 100,29% (kategori “sangat baik”).

* + 1. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.**

Capaian Indikator Sasaran IV jika dibandingkan perkembangan nya dari capaian tahun 2016 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.33 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.33. | Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran IV Tahun 2017 sd 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | | | | | | |
| 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
| Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB (72,5%) | BB (72,14%) | 99,5% | BB (73%) | BB (72,14%) | 98,82% | BB  (74%) | BB  (73%) | 98,65% |

Dari Tabel 3.33 di atas, dapat dilihat bahwa target indicator sasaran IV dapat terealisasi dengan baik dimana untuk Indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas dari tahun 2017 s/d 2019 dapat terealisasi dengan baik dengan capaian di atas 90% sedangkan untuk target indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan dapat terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian > dari 100%. Setiap tahunnya dari tahun 2017 sd 2019.

* + 1. **Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.**

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran IV Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 berdasarkan target Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.34. | Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi  2018 | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian sd 2018 terhadap Renstra 2021 |
| 4 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabiloitas Kinerja | BB  (73%) | A (80.00%) | 91,25% |

Dari tabel 3.34. di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran IV dari target Akhir Renstra Tahun 2021 dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas sebesar 91,25% dan indikator Persentase capaian Realisasi keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas sebesar 100,29%. Diharapkan Capaian dari kedua indikator Sasaran IV ini dapat terealisasi 100% sampai akhir Renstra 2021 nanti.

* + 1. **Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dengan target BB dan terealisasi BB dengan tingkat capaian 98,65%, Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain : adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program dan kegiatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya, melakukan penyempurnaan sistem penyusunan perencanaan

Sedangkan keberhasilan Indikator Kinerja Persentase capaian Realisasi keuangan dan fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan dari target 95% terealisasi sebesar 95,28% dengan tingkat capaian 100,29%. Hal ini didukung dengan adanya kontrol yang cukup kuat oleh pimpinan dan seluruh pelaksana kegiatan, dimana setiap realisasi anggaran harus disesuaikan dengan aliran kas yang telah disusun setiap bulannya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2019 mengelola Anggaran sebesar Rp. 40.572.914.555,- yang meliputi 1). Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 23.388.811.931,- dimana realisasi keuangan sebesar 94,53% dan realisasi fisik sebesar 100%. 2). Belanja Langsung yang sebanyak 12 program yang terdiri dari 6 program dan 24 kegiatan pada Belanja Langsung Pokok dan 6 program 52 kegiatan pada belanja langsung urusan, dimana realisasi keuangan sebesar 95,28% dan realisasi fisik sebesar 100%. Dalam setiap monitoring yang dilakukan secara berkala setiap bulannya akan menerbitkan Nota Kepala Dinas untuk melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan dan teguran bagi pelaksana kegiatan yang capaiannya dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini juga dilakukan untuk realisasi fisik dan keuangan anggaran APBN

* + 1. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas dan Indikator Kinerja Persentase capaian Realisasi fisik dan keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2019 cukup baik, hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan. Disamping itu melakukan revisi anggaran dan kegiatan bagi kegiatan – kegiatan yang potensi menghambat capaian realisasi fisik dan keuangan, sehingga anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan semaksimal dan seefisien mungkin, hal ini dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 95% serta tingkat efisiensi dalam mencapai akuntabilitas kinerja terhadap penggunaan anggaran sebesar 96,31% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.35 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.35. | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | % Capain Kinerja | Persentase Penyerapan Anggaram | % Tingkat Efisiensi |
|
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | - | Nilai Evaluasi Akuntabiloitas Kinerja | 98.25% | 95.28% | 96.98 |

1. **REALISASI ANGGARAN**

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melaksanaan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD dan APBN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

* 1. **Realisasi Anggaran APBD**

Pada Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengelola dana APBD sebesar Rp. 40.572.914.555,- yang terdiri 12 Program dan 79 Kegiatan yang meliputi 1). Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 23.388.811.931,- dimana realisasi keuangan sebesar 94,53% dan realisasi fisik sebesar 100%. 2). Belanja Langsung yang sebanyak 12 program yang terdiri dari 6 program dan 24 kegiatan pada Belanja Langsung Pokok dan 6 program 52 kegiatan pada belanja langsung dimana realisasi keuangan sebesar 95,28% dan realisasi fisik sebesar 100% urusan dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.36. | Analisis Akuntabilitas keuangan. Realisasi Anggaran |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Belanja | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi | | | Sisa (Rp) |
| Fisi (%) | Keuangan (Rp | % |
| 1 | Belanja Tak Langsung | 23.683.445.556 | 100 | 23.388.811.931 | 94,53 | 1.294.633.625 |
| 2 | Belanja Langsung | 16.889.468.999 | 100 | 16.092.260.218 | 95,28 | 797.208.781 |
|  | Jumlah Total | 40.572.914.555 | 100 | 38.481.072.149 | 94,84 | 2.091.842.406 |

Pagu anggaran sebagaimana pada tabel di atas merupakan pagu anggaran APBD setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 40.572.914.555,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.481.072.149,- (94,84%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Pagu Anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 3.36. | Laporan Realisasi APBD sampai dengan Desember 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO URUT** | **JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN** | | **JUMLAH PAGU** | **TARGET** | **REALISASI** | | | | | **SISA** | |
| **FISIK (%)** | **KEU** | **%** | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |
| **II** | **BELANJA LANGSUNG** | | **16.889.468.799** | **16.889.468.799** | **99,93** | **16.092.260.218,42** | **95,28** | | | **797.208.581** | |
| **A** | **POKOK** | | **5.738.080.971** | **5.738.080.971** | **100** | **5.389.384.184** | **93,92** | | | **348.696.787** | |
| **(1)** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | | **2.677.279.093** | **2.677.279.093** | **100,00** | **2.391.455.294** | **89,32** | | | **285.823.799** | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | | 79.420.050 | 79.420.050 | 100,00 | 75.981.349 | 95,67 | | | 3.438.701 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 626.258.000 | 626.258.000 | 100,00 | 485.132.671 | 77,47 | | | 141.125.329 | |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor | | 1.259.083.000 | 1.259.083.000 | 100,00 | 1.146.546.548,42 | 91,06 | | | 112.536.451,58 | |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | | 112.000.000 | 112.000.000 | 100,00 | 111.178.050 | 99,27 | | | 821.950 | |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 75.459.000 | 75.459.000 | 100,00 | 74.221.200 | 98,36 | | | 1.237.800 | |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 43.000.000 | 43.000.000 | 100,00 | 42.868.875 | 99,70 | | | 131.125 | |
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | 24.000.000 | 24.000.000 | 100,00 | 21.730.000 | 90,54 | | | 2.270.000 | |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | | 368.819.043 | 368.819.043 | 100,00 | 348.806.601 | 94,57 | | | 20.012.442 | |
| 9 | Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi | | 14.600.000 | 14.600.000 | 100,00 | 11.000.000 | 75,34 | | | 3.600.000 | |
| 10 | Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur | | 21.600.000 | 21.600.000 | 100,00 | 21.200.000 | 98,15 | | | 400.000 | |
| 11 | Penyediaan makanan dan minuman | | 53.040.000 | 53.040.000 | 100,00 | 52.790.000 | 99,53 | | | 250.000 | |
| **NO URUT** | | **JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN** | **JUMLAH PAGU** | **TARGET** | **REALISASI** | | | | **SISA** | |
| **FISIK (%)** | **KE** | | **%** |
| 1 | | 2 | 3 | 3 |  | 3 | |  | 3 | |
| **(2)** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **2.030.895.378** | **2.030.895.378** | **100** | **1.990.718.020** | | **98,02** | **40.177.358** | |
| 1 | | Pengadaan Mebeleur | 237.300.000 | 237.300.000 | 100 | 236.048.000 | | 99,47 | 1.252.000 | |
| 2 | | Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi | 239.349.688 | 239.349.688 | 100 | 238.848.000 | | 99,79 | 501.688 | |
| 3 | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 409.641.000 | 409.641.000 | 100 | 401.000.750 | | 97,89 | 8.640.250 | |
| 4 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | 261.250.000 | 261.250.000 | 100 | 242.576.903 | | 92,85 | 18.673.097 | |
| 5 | | Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur | 57.600.000 | 57.600.000 | 100 | 57.280.000 | | 99,44 | 320.000 | |
| 6 | | Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor | 485.176.000 | 485.176.000 | 100 | 483.380.000 | | 99,63 | 1.796.000 | |
| 7 | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 264.628.690 | 264.628.690 | 100 | 263.684.800 | | 99,64 | 943.890 | |
| 8 | | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan gedung kantor | 75.950.000 | 75.950.000 | 100 | 67.899.567 | | 89,40 | 8.050.433 | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **(3)** | | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **189.580.000** | **189.580.000** | **100** | **186.590.000** | | **98,42** | **2.990.000** | |
| 1 | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 189.580.000 | 189.580.000 | 100 | 186.590.000 | | 98,42 | 2.990.000 | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **(4)** | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **12.000.000** | **12.000.000** | **100** | **11.500.000** | | **95,83** | **500.000** | |
| 1 | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 |  | |  |  | |  | |  | 483.380.000 | 99,63 | 1.796.000 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | 263.684.800 | 99,64 | 943.890 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO URUT** | **JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN** | | **JUMLAH PAGU** | | **TARGET** | | | **REALISASI** | | | **JUMLAH PAGU** |
| **FISIK (%)** | **KEU** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | 3 | | |  | 3 |  | 3 |
| **(5)** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | | **828.326.500** | | **828.326.500** | | | **100** | **809.120.870** | **97,68** | **19.205.630** |
| 1 | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | | 113.960.000 | | 113.960.000 | | | 100 | 111.281.150 | 97,65 | 2.678.850 |
|  | Penatausahaan keuangan SKPD | | 328.930.000 | | 328.930.000 | | | 100 | 315.645.450 | 95,96 | 13.284.550 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 215.342.000 | | 215.342.000 | | | 100 | 212.255.281 | 98,57 | 3.086.719 |
| 2 | Pengolahan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD | | 170.094.500 | | 170.094.500 | | | 100 | 169.938.989 | 99,91 | 155.511 |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **B** | **URUSAN** | | **11.151.387.831** | | **11.151.387.831** | | | **99,89** | **10.702.876.037** |  | **448.511.794** |
| **(1)** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | **6.757.486.803** | | **6.757.486.803** | | | **99,83** | **6.497.045.906** | **96,15** | **260.440.897** |
| 1 | Sosialisasi dan Seleksi Daerah Calon Peserta Magang ke Jepang | | 75.587.500 | | 75.587.500 | | | 100 | 70.428.549 | 93,17 | 5.158.951 |
| 2 | Pelatihan Wirausaha Baru Produktiv | | 192.894.000 | | 192.894.000 | | | 100 | 185.615.000 | 96,23 | 7.279.000 |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD BLK Payakumbuh | | 2.434.359.000 | | 2.434.359.000 | | | 100 | 2.354.597.170 | 96,72 | 79.761.830 |
| 4 | Akredetasi Lembaga Pelatihan Kerja | | 103.000.000 | | 103.000.000 | | | 100 | 90.611.467 | 87,97 | 12.388.533 |
| 5 | Seleksi Pusat Calon Peserta Magang ke Jepang | | 233.660.000 | | 233.660.000 | | | 100 | 211.931.714 | 90,70 | 21.728.286 |
| 6 | Pembentukan dan Pembinaan Klinik Produktivitas | | 147.571.000 | | 147.571.000 | | | 92,00 | 100.997.864 | 68,44 | 46.573.136 |
| 7 | Monitoring program pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota | | 49.581.000 | | 49.581.000 | | | 100 | 49.563.226 | 99,96 | 17.774 |
| **NO URUT** | **JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN** | | **JUMLAH PAGU** | | | **TARGET** | | **REALISASI** | | | **SISA** |
| **FISIK (%)** | **KEU** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri | | 201.320.000 | | | 201.320.000 | | 100 | 195.783.200 | 97,25 | 5.536.800 |
| 9 | Pengukuran Produktivitas Makro | | 77.628.000 | | | 77.628.000 | | 100 | 72.080.200 | 92,85 | 5.547.800 |
| 10 | Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi Pelatihan | | 188.750.000 | | | 188.750.000 | | 100 | 188.281.700 | 99,75 | 468.300 |
| 11 | Bimtek dan Upgrading Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas dan Pembinaan Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas | | 138.906.000 | | | .906.000 | | 100 | 137.547.200 | 99,02 | 1.358.800 |
| 12 | Workshop Pemagangan | | 226.060.000 | | | .060.000 | | 100 | .416.100 | 94,41 | 12.643.900 |
| 13 | Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi usaha Produktif | | 244.768.000 | | | .768.000 | | 100 | 224.916.000 | 91,89 | 19.852.000 |
| 14 | Pelatihan Pra Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang | | 404.019.000 | | | 404.019.000 | | 100 | 377.038.850 | 93,32 | 26.980.150 |
| 15 | Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM) | | 199.383.300 | | | 199.383.300 | | 100 | 199.383.000 | 100,00 | 300 |
| 16 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di UPTD BLK Padang Panjang | | 1.840.000.000 | | | 1.840.000.000 | | 100 | 1.824.854.663 | 9,18 | 15.145.337 |
|  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| **(2)** | **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DIVERIFIKASI USAHA** | | **1.805.085.003** | | | **1.805.085.003** | | **100,00** | **1.767.069.253** | **97,89** | **38.015.753** |
| 1 | Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) | | 69.864.600 | | | 69.864.600 | | 100 | 64.694.850 | 92,60 | 5.169.750 |
| 2 | Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | | 416.940.000 | | | 416.940.000 | | 100 | 410.480.150 | 98,45 | 6.459.850 |
| 3 | Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) | | 131.217.000 | | | 131.217.000 | | 100 | 130.589.600 | 99,52 | 627.400 |
| 4 | Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) | | 245.263.000 | | | 245.263.000 | | 100 | 239.307.900 | 97,57 | 5.955.100 |
|  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| **NO URUT** | | **JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN** | | **JUMLAH PAGU** | | **TARGET** | **REALISASI** | | | | **SISA** |
| **FISIK (%)** | | **KEU** | **%** |
| 1 | | 2 | | 3 | | 3 |  | | 3 |  | 3 |
| 5 | | Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri | | 136.894.000 | | 136.894.000 | 100 | | 136.734.000 | 99,88 | 160.000 |
| 6 | | Pengumpulan dan Pengelolahan Data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian | | 54.007.800 | | 54.007.800 | 100 | | 48.438.049 | 89,69 | 5.569.751 |
| 7 | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja | | 160.000.000 | | 160.000.000 | 100 | | 159.723.450 | 99,83 | 276.550 |
| 8 | | Monitoring dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100 | | 97.284.301 | 97,28 | 2.715.699 |
| 9 | | Pembinaan Bursa Kerja Online | | 132.921.000 | | 132.921.000 | 100 | | 132.576.400 | 99,74 | 344.600 |
| 10 | | Bimtek Petugas Pengumpulan Dan Pengolahan Informasi Pasar Kerja | | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100 | | 50.000.000 | 100,00 | - |
| 11 | | Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) | | 150.010.000 | | 150.010.000 | 100 | | 142.546.500 | 95,02 | 7.463.500 |
| 12 | | Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra- Pemberangkatan | | 65.931.000 | | 65.931.000 | 100 | | 65.421.000 | 99,23 | 510.000 |
| 13 | | Forum Grup Diskusi Teknis Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) | | 69.030.000 | | 69.030.000 | 100 | | 68.378.700 | 99,06 | 651.300 |
| 13 | | Pengumpulan dan pengolahan data Informasi Pasar Kerja (IPK) | | 23.006.600 | | 23.006.600 | 100 | | 20.894.350 | 90,82 | 2.112.250 |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **(3)** | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN** | | **688.056.303** | | **688.056.303** | **100** | | **629.721.297** | **91,52** | **58.335.009** |
| 1 | | Pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan | | 62.047.800 | | 62.047.800 | 100 | | 46.184.878 | 74,43 | 15.862.922 |
| 2 | | Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten/Kota | | 42.976.000 | | 42.976.000 | 100 | | 36.764.300 | 85,55 | 6.211.700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO URUT** | **JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN** | **JUMLAH PAGU** | **TARGET** | **REALISASI** | | | **JUMLAH PAGU** |
| **FISIK (%)** | **KEU** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 3 | Pemeriksaan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab/Kota | 192.240.000 | 192.240.000 | 100 | 170.213.092 | 88,54 | 22.026.908 |
| 4 | Penanganan kasus ketenagakerjaan | 106.859.950 | 106.859.950 | 100 | 90.236.348 | 84,44 | 16.623.602 |
| 5 | Pembinaan Penerapan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan | 178.881.000 | 178.881.000 | 100 | 175.686.814 | 98,21 | 3.194.186 |
| 6 | Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) | 75.151.000 | 75.151.000 | 100 | 74.729.300 | 99,44 | 421.700 |
| 7 | Akreditasi laboratorium | 51.000.000 | 51.000.000 | 100 | 47.309.900 | 92,76 | 3.690.100 |
| 8 | Pemeriksaan Kesehatan Kerja | 57.850.000 | 57.850.000 | 100 | 57.640.000 | 99,64 | 210.000 |
| 9 | Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) Di Perusahan | 70.083.400 | 70.083.400 | 100 | 66.757.800 | 95,25 | 3.325.600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(5)** | **PROGRAM PENGADAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM** | **111.200.000** | **111.200.000** | **100** | **83.961.954** | **75,51** | **27.238.046** |
| 1 | Pemeliharaan Alat Labor | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 | 39.361.354 | 98,40 | 638.646 |
| 2 | Pengadaan Alat Labor | 71.200.000 | 71.200.000 | 100 | 44.600.600 | 62,64 | 26.599.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO URUT** | **JENIS BELANJA / NAMA KEGIATAN** | **JUMLAH PAGU** | **TARGET** | **REALISASI** | | | **JUMLAH PAGU** |
| **FISIK (%)** | **KEU** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN   KEUANGAN DAERAH** | **192.588.000** | **192.588.000** | **100** | **192.438.000** | **99,92** | **150.000** |
| 1 | Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi | 192.588.000 | 192.588.000 | 100 | 192.438.000 | 99,92 | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(6)** | **PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL** | **648.386.378** | **648.386.378** | **100** | **643.195.964** | **99,20** | **5.190.414** |
| 1 | Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi | 175.470.000 | 175.470.000 | 100 | 174.640.225 | 99,53 | 829.775 |
| 2 | Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi | 60.030.000 | 60.030.000 | 100 | 59.281.600 | 98,75 | 748.400 |
| 3 | Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi | 322.165.678 | 322.165.678 | 100 | 320.909.715 | 99,61 | 1.255.963 |
| 4 | Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi | 90.720.700 | 90.720.700 | 100 | 88.364.424 | 97,40 | 2.356.276 |

* 1. Realisasi Anggaran APBN

Pada tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengelola Anggaran APBN untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sebesar Rp. 13.694.264.000,- yang meliputi Dana Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp. 10.697.428.000 dan Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 2.996.836.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.414.793.284,- (97,96%) dan realisasi fisik sebesar 97,92%. Fisik kegiatan tidak dapat terlaksana 100% karena ada beberapa kegiatan antara lain kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian , pengadaan catu pangan, fasilitasi layanan social di SP dan kawasan Transmigrasi serta perpindahan dan penempatan transmigrasi tidak terlaksana 100 hal ini disebabkan batalnya warga transmigran yang berasal dari Suku Anak yang telah dialokasikan untuk menempati kawasan transmigrasi namun batal dengan alasan mereka tidak lebih suka hidup secara berpindah – pindah, sehingga hal ini mempengaruhi alokasi pendistribusian sarana produksi pertanianm catu pangan dan fasilitasi lainnya. Secara rinci realisasi anggaran APBN dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program / Kegiatan** | **Pagu Anggaran (Rp)** | | **Jumlah** | **Realisasi** | | | **Sisa Anggaran** |
| DK | TP | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | % |
| **1** | Program pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 931.648.000 | 0 | 931.648.000 | 97,98 | 901.555.770 | 96,77 | 30.092.230 |
| **2** | Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | 1.230.570.000 | 0 | 1.230.570.000 | 100 | 1.207.558.341 | 98,13 | 23.011.659 |
| **3** | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | 8.103.899.000 | 0 | 8.103.899.000 | 100 | 7.996.927.533 | 98,68 | 106.971.467 |
| **4** | Program Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 431.311.000 | 0 | 431.311.000 | 100 | 402.605.900 | 93,34 | 28.705.100 |
| **5** | Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi | 946.600.000 | 0 | 946.600.000 | 100 | 927.668.000 | 98,00 | 18.932.000 |
| **6** | Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 0 | 2.050.236.000 | 2.050.236.000 | 100 | 1.978.477.740 | 96,50 | 71.758.260 |
|  | Jumlah Total | 10.697.428.000 | 2.996.836.000 | 13.694.264.000 | 99,86 | 13.414.793.284 | 97,96 | 279.470.716 |